



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2025.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pertanian;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Inspektorat Daerah;

bb. Kecamatan . . .

bb. Kecamatan Pati;
cc. Kecamatan Margorejo;
dd. Kecamatan Tlogowungu;
ee. Kecamatan Gembong;
ff. Kecamatan Tayu;
gg. Kecamatan Margoyoso;
hh. Kecamatan Gunungwungkal;
ii. Kecamatan Cluwak;
jj. Kecamatan Dukuhseti;
kk. Kecamatan Kayen;
ll. Kecamatan Gabus;
mm. Kecamatan Tambakromo;
nn. Kecamatan Juwana;
oo. Kecamatan Trangkil;
pp. Kecamatan Wedarijaksa;
qq. Kecamatan Batangan;
rr. Kecamatan Jakenan;
ss. Kecamatan Jaken;
tt. Kecamatan Winong;
uu. Kecamatan Pucakwangi;
vv. Kecamatan Sukolilo; dan
ww. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Isi beserta uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001

**RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimaksud Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Proses penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD serta dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah definitif. Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara stimulan/paralel dengan penyusunan

RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dulu kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026.

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana/pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, program, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam Renja Perangkat Daerah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan / atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang terakomodir pada RKPD terdiri program dan kegiatan yang bersumber APBD Kabupaten. Dengan terbatasnya APBD Kab. Pati perlu terobosan-terobosan kegiatan ke Kementerian terkait. Oleh karena itu kegiatan yang ada di RKPD juga merupakan sinkronisasi RKP masing-masing Kementerian.

Program dan kegiatan yang ada di RKPD secara ideal terealisasi pada program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kab. Pati dan yang tidak tercantum pada RKPD tidak bisa terdani. Oleh karena itu setiap penyusunan Renja, PPTK harus selalu menggali masing-masing tugas fungsi, mencermati usulan hasil Musrenbang agar program dan kegiatan

dapat didukung dengan APBD Kab. Pati dan pelaksanaannya tepat sasaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

10. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025.
13. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 050/2079.6 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah adalah untuk memberikan landasan dan pedoman kebijakan operasional kepada Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan wewenang, peran, tugas fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- 1) Menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didukung dengan program-program prioritas, kegiatan beserta anggaran;
- 2) Menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah ke dalam operasional program kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025;
- 3) Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber ke dalam operasional program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- 4) Mewujudkan efisiensi, efektivitas serta tepat sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
- 4.2 Manajemen Risiko Program, Kegiatan, sub kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026

Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 beberapa program dan/atau kegiatan yang realisasinya yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja yang meliputi kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja;
- 2) Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
- 3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan program dan/atau kegiatan yang telah berhasil memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi kegiatan :
 - a) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintah meliputi kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat;
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah;
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e) Administrasi Umum Perangkat;
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selain itu beberapa Program dan/atau kegiatan telah berhasil melampaui target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - c) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja meliputi kegiatan :
 - a) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota;
 - c) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
- 3) Program Hubungan Industrial meliputi kegiatan :
 - a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintah meliputi kegiatan :
 - a) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Secara umum, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan/ atau kegiatan adalah tidak teralokasinya anggaran dalam Renja tahun 2023 sesuai dengan prioritas kebutuhan dan terbatasnya keterampilan dan sumber daya manusia Perangkat Daerah.

Dalam hal keberhasilan pencapaian target kinerja, perencanaan yang cermat, terukur, berbasis data dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran disertai dengan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan mampu menjadi faktor pendorong, sehingga sebagian besar Program dan/atau Kegiatan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, bahkan beberapa mampu lampau target. Lebih lanjut, faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Peserta pelatihan meningkatkan ketrampilan dengan uji kompetensi guna mencari pekerjaan;
- b. Kemudahan LPK untuk permohonan akreditasi melalui OSS untuk peningkatan mutu kualitas lembaga;
- c. Penyebarluasan informasi bursa kerja melalui job fair, job canvassing, LPKS, BKK, media sosial secara mudah dan masif;
- d. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi di perusahaan untuk kerjasama (MoU) penempatan;
- e. Bekerja ke luar negeri;

- f. Peningkatan jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, pencegahan perselisihan dengan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, kunjungan perusahaan, pertemuan dengan Pengusaha, Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan harapan kondisi ketenagakerjaan semakin kondusif.

Dengan tidak tercapainya beberapa target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan maka beberapa implikasi yang ditimbulkan adalah

- Belum tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja yang baru maka dalam pengambilan kebijakan di sektor ketenagakerjaan masih berpedoman pada dokumen perencanaan tenaga kerja yang lama sehingga kurang efektif karena berbasis data yang belum up to date
- Terdapat perusahaan kecil yang belum meningkat produktivitasnya sehingga memiliki daya saing produk masih rendah
- Calon Pekerja Migran Indonesia/PMI ada yang berangkat secara illegal atau non prosedural sehingga perlu sosialisasi dan pembinaan tentang peraturan penempatan tenaga kerja ke luar negeri

Untuk mengatasi implikasi atau dampak yang ditimbulkan sebagai akibat tidak tercapainya target kinerja sebagaimana diatas, kebijakan yang ditempuh yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja makro telah dianggarkan pada tahun anggaran 2024 dan dokumen perencanaan tenaga kerja mikro dianggarkan pada tahun anggaran 2024 dan direncanakan dalam penganggaran tahun 2025, sehingga dengan disusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja berbasis data yang up to date diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan di sektor tenaga kerja.
- Pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil secara periodik dianggarkan pada tahun anggaran 2024 dan rencana penganggaran tahun 2025 sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil.
- Pelaksanaan pengukuran produktivitas pada perusahaan kecil secara periodik dianggarkan pada tahun anggaran 2024 dan rencana penganggaran tahun 2025 dengan narasumber yang kompeten untuk memperoleh hasil pengukuran yang valid sebagai bahan pengambilan kebijakan.

- Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring secara rutin sebagai evaluasi kebijakan.
- Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) dianggarkan pada tahun anggaran 2024 dan rencana penganggaran tahun 2025
- Pemberdayaan PMI melalui kegiatan pembinaan Desmigratif sebagai upaya peningkatan keterampilan dan kesejahteraan PMI dianggarkan pada tahun anggaran 2024 dan rencana penganggaran tahun 2025

Selain itu program dan kegiatan yang mendukung pencapaian program strategis nasional, provinsi, ataupun sasaran strategis perangkat daerah, menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pati sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Kab. Pati
Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta SubKegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4.a	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	NON URUSAN										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan	Persen	400	0	100	100	100	100	200	50
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	24	0	6	6	100	6	12	50
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	8	0	2	2	100	2	4	50
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	4	0	1	1	100	1	2	50
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	4	0	1	1	100	1	2	50
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Doku men	4	0	1	1	100	1	2	50

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta SubKegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4.a	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	199	0	49	49	100	50	99	49,75
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Doku men	128	0	32	32	100	32	64	50
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	197	0	47	47	100	50	97	49,24
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	48	0	12	12	100	12	24	50
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	0	1	1	100	1	2	50
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	104	0	26	26	100	26	52	50
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Laporan	16	0	4	4	100	4	8	50
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16	0	4	4	100	4	8	50
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Jenis laya nan	8	0	2	2	100	2	4	50

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta SubKegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4.a	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	215	0	0	0	0	70	70	32,56
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang / Bulan	215	0	0	0	0	70	70	32,56
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pendukung adminstrasi umum perangkat daerah	Jenis	28	0	7	7	100	7	14	50
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	1	1	100	1	2	50
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	1	1	100	1	2	50
5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	0	1	1	100	1	2	50
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doku men	200	0	50	18	36	50	68	34
5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	0	24	36	150	25	61	61
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	728 5	0	560	625	111.67	560	1185	16,27
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	80	0	20	25	125	20	45	56,25

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta SubKegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4.a	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	16	0	1	6	600	3	9	56,25
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	0	1	6	100	3	9	64,29
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jenis Layanan	28	0	7	7	100	7	14	50
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2830	0	700	400	100	700	1100	38,87
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	0	12	12	100	12	24	50
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	0	12	12	100	12	24	50
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	24	0	6	6	100	6	12	50
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	150	0	37	37	100	38	75	50

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta SubKegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4.a	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	653	0	158	56	35.89	165	221	33,84
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	0	1	1	100	1	2	50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rasio realisasi/target yang ditetapkan di RTK	Angka	0.94	0	0.94	0	0	0.94	0.94	100
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah RTK yang tersusun	Doku men	4	0	1	0	0	1	1	25
1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Doku men	3	0	1	0	0	1	1	33.34
1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusa haan	15	0	5	0	0	5	5	33.34
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	Persen	37.75	0	31	40	129	35	37,5	99,38
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi	Persen	37.75	0	30	40	133,33	35	37,5	99,38
1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	208	0	48	368	766.67	48	416	200

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta SubKegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4.a	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lemba ga	15	0	0	0	0	5	5	33,33
1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi (LPKS)	Orang	400	0	100	101	101	100	201	50.25
2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lemba ga	4	0	1	1	100	1	2	50
3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	Lemba ga	4	0	1	4	400	1	5	125
3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizin an	4	0	1	4	100	1	5	125
4	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktivitasnya meningkat	Perusa haan	26	0	5	3	60	6	9	34,62
4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusa haan	40	0	10	10	100	10	20	50
5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Persen	10	0	1	1	100	2	2	20

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta SubKegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4.a	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Doku men	4	0	1	1	100	1	2	50
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	Persen	73	0	65	66.22	101.88	70	68,11	93,30
1	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	23000	0	5000	5502	110	5500	11002	47,83
1.1	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	3000	0	0	0	0	1000	1000	33,33
1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	300	0	0	0	0	100	100	33,33
1.3	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	80	0	20	16	80	20	36	45
2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan lewat LPTKS	Orang	300	0	100	1176	1176	100	1276	425,33
2.1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lemba ga	54	0	18	8	44.44	18	26	48,15
3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang bisa diakses oleh pencari	Orang	23,000	0	5000	5592	111,84	5500	11092	48,23

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta SubKegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4.a	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Doku men	48	0	12	12	100	12	24	50
3.2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Orang	14300	0	3500	5502	100	3600	9102	63,65
4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang ditempatkan dari PPPMI	Orang	300	0	0	0	0	100	100	33,33
4.1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	13	0	1	0	0	3	4	30,77
4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	300	0	100	0	0	100	100	33,33
4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	30	0	10	0	0	10	10	33,33
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja	Angka	4	0	1	1	100	1	2	50
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persen	200	0	20	25	125	40	65	32,5

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Pada akhir tahun 2016 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati berubah nomenklatur menjadi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja.

Dari hasil capaian kinerja selama 1 (satu) tahun 2023 ada beberapa capaian kinerja pelayanan yang masih di bawah target yaitu :

1. Pertumbuhan penempatan kerja;
2. Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati berikut ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A. IK Renstra PD 2023-2026												
1	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja			1,7 Angka	1,4 Angka	1,15 Angka	0,9 Angka	0,77 Angka	0,77 Angka	0,73 Angka	0,70 Angka	Data 2023 BPS belum rilis (Data perhitungan tahun 2021 dan 2022)
2	Pertumbuhan penempatan tenaga kerja			50%	50%	50%	50%	10,95 %	50%	50%	50%	
3	Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			69,15%	69,30%	69,45%	69,60%	73,10%	73,10%	73,30%	73,50%	
5	Peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah			46 Juta/Org	46,5 Juta/Org	47 Juta/Org	47,5 Juta/Org	46,26 Juta/Org	46,26 Juta /Org	47,25 Juta /Org	47,75 Juta /Org	
6	Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK			0,94 Angka	0,94 Angka	0,94 Angka	0,94 Angka	0 Angka	0 Angka	0,94 Angka	0,94 Angka	Belum dilaksanakan di tahun 2023 dan 2024
7	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja			31 %	35 %	40 %	45 %	40 %	13 %	42 %	45 %	
8	Persentase Tenaga Kerja yang terserap			65 %	70 %	75 %	82 %	66.22 %	60 %	75 %	82 %	
9	Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja			1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	0,5 Angka	1 Angka	1 Angka	
10	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %	

1. Indeks elastisitas kesempatan kerja tercapai tahun 2023 sebesar 0,77 Angka (data perhitungan tahun 2021 dan 2022) bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pati telah membawa dampak terhadap penyerapan tenaga kerja walaupun sedikit. Diharapkan investor yang menanamkan modal dan berusaha di Kabupaten Pati meningkat sehingga penyerapan tenaga kerja optimal. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II disamakan dengan tahun 2023 karena data bersifat tahunan dan sumber data dari BPS.
2. Pertumbuhan penempatan tenaga kerja belum tercapai tahun 2023 sebesar 10,95% disebabkan oleh sebagian pencari kerja belum mau ditempatkan di luar kota, pencari kerja belum berkompentensi, kurikulum pendidikan vokasi untuk lebih ke skill digital, pencari kerja masih memilih lowongan kerja yang diinginkan. Upaya dilakukan untuk meningkatkan penempatan dengan melaksanakan job canvassing, job fair/bursa kerja, bimbingan jabatan, koordinasi dengan dinas pendidikan, revitalisasi pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan peningkatan uji kompetensi. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebesar 50% karena data bersifat tahunan jadi untuk perhitungan belum selesai.
3. Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial tercapai 100% menunjukkan bahwa perselisihan antara pengusaha dan pekerja berupa perselisihan hak, perselisihan PHK terselesaikan dengan cara perjanjian bersama dan anjuran. Penyelesaian perkara didukung oleh jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, pencegahan perselisihan dengan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, kunjungan perusahaan, pertemuan dengan Pengusaha, Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan harapan kondisi ketenagakerjaan semakin kondusif.
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 mengalami peningkatan dari 71,52% menjadi 73,10 % menunjukan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Diharapkan penduduk usia produktif semakin aktif dalam perekonomian di Kabupaten Pati. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II memakai data tahun lalu karena sumber data dari BPS ada.

5. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 46,26 Juta/Orang menunjukkan bahwa tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dalam kondisi standar dan dapat diukur. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas adalah Membangun komunikasi dua arah secara efektif, Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan Mengadakan Program Pelatihan Kerja untuk peningkatan kompetensi. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II memakai data tahun lalu karena sumber data dari BPS belum ada.
6. Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja tahun 2023 tercapai sebesar 40 % menunjukkan bahwa tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi meningkat produktivitasnya sehingga tenaga kerja semakin berkompetensi dalam kejuruan tertentu. Tenaga kerja harus meningkatkan kemampuan demi berhasilnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Maka, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan salah satunya melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi, pendidikan, pengembangan dan sebagainya. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang terakreditasi meningkatkan pelayanan dan kompetensi tenaga kerja. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 13% karena sertifikat uji kompetensi yang belum diterima peserta pelatihan di karenakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNSP Provinsi Jawa Tengah masih proses sertifikat uji kompetensi.
7. Persentase Tenaga Kerja yang terserap tahun 2023 tercapai 66,22% bahwa tenaga kerja ditempatkan pada lapangan kerja yang ada dibandingkan pencari kerja yang terdaftar sehingga penempatan bisa optimal. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan penempatan adalah job canvassing, job fair, info loker lewat media sosial secara masif dan rutin dan melalui program kewirausahaan. Perusahaan belum semuanya melaporkan penempatan tenaga kerja sehingga perlu dilakukan kunjungan dan atensi yang baik. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 60% karena lowongan kerja yang terdaftar dan peningkatan penempatan terpenuhi

sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam industri padat karya.

8. Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja tahun 2023 dengan capaian kinerja 1 Angka, bahwa perselisihan di tahun 2023 sejumlah 10 perkara terselesaikan semua dengan cara 8 Perjanjian Bersama (PB) dan 2 Anjuran sehingga antara pengusaha maupun pekerja menerima hasil mediasi. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 0,5 Angka.
9. Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan dengan capaian 100 %, menunjukkan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mendukung program-program teknis yang dilaksanakan guna mencapai target yang ditentukan. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 50%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada RPJPD Kabupaten Pati tahun 2005-2025, pembangunan Kabupaten Pati diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya;
- b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan;
- e. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah;
- f. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal.

Memperhatikan arah pembangunan dalam RPJPD 2005-2025, dan hasil evaluasi terhadap target capaian kinerja pembangunan daerah RPJMD 2023-2026 serta permasalahannya, maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan;

- b. Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;
- c. Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat;
- d. Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik.

Permasalahan penting yang berkembang di masyarakat saat ini tertuang di Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Tahun 2023 – 2026 adalah:

- 1. Rendahnya peningkatan tenaga kerja yang kompeten;
- 2. Rendahnya penempatan tenaga kerja dan lowongan kerja di pasar kerja;
- 3. Belum optimalnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) yang kredibel;
- 4. Meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
- 5. Rendahnya peningkatan perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan sarana hubungan industrial;
- 6. Masih terbatasnya MoU dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi;
- 7. Masih terbatasnya penempatan transmigran.

Masalah pokok yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam urusan tenaga kerja adalah (1) Belum optimalnya pengelolaan lembaga peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan (2) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja daerah. Selain masalah pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja menghadapi 4 (empat) Masalah. *Pertama*, Belum optimalnya pengelolaan lembaga BLK (Kurikulum dan kerjasama penempatan tenaga kerja ke pasar kerja); Belum optimalnya sarana penyaluran Tenaga Kerja di LPKS yang disebabkan oleh Masih kurangnya kerjasama BLK dalam penempatan tenaga kerja terampil ke perusahaan; Kurikulum pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan masih adanya LPKS belum memiliki BKK (Bursa Kerja Khusus). Masalah *Kedua* yaitu Masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan penyedia pasar kerja yang disebabkan oleh Kekurangan SDM khususnya fungsional Pengantar Kerja. Masalah *Ketiga* yaitu Belum optimalnya layanan P3MI kepada CPMI yang disebabkan belum sepenuhnya CPMI mendaftarkan di lembaga P3MI di Pati. Masalah *Keempat* yaitu Belum optimalnya tingkat kepatuhan perusahaan tentang aturan

ketenagakerjaan yang terlihat dari masih adanya perkara hubungan industrial (Pemenuhan Hak pekerja yang belum di berikan).

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati adalah Belum optimalnya pengelolaan lembaga peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja daerah.

Permasalahan yang timbul adalah Belum optimalnya pengelolaan lembaga BLK (Kurikulum dan kerjasama penempatan tenaga kerja ke pasar kerja); Belum optimal sarana penyaluran Tenaga Kerja di LPKS; Masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan penyedia pasar kerja; Belum optimalnya layanan P3MI kepada CPMI dan Belum optimalnya tingkat kepatuhan perusahaan tentang aturan ketenagakerjaan.

Dengan akar masalah sebagai berikut Masih kurangnya kerjasama BLK dalam penempatan tenaga kerja terampil ke perusahaan; Kurikulum pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; LPKS belum memiliki BKK (Bursa Kerja Khusus); Kekurangan SDM (Pengantar Kerja); Belum sepenuhnya CPMI mendaftarkan di lembaga P3MI di Pati; Masih adanya perkara hubungan industrial (Pemenuhan Hak pekerja yang belum di berikan)

Berdasarkan pencapaian visi misi Kepala Daerah terhadap capaian program kegiatan nasional adalah :

a. Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional.

Tujuan dari SDGs yang masuk di tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja antara lain pada Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dan Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Pencapaian SDGs, akan didukung melalui program:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi kegiatan :
 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 Kabupaten / Kota;
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan.
- b. Pengentasan kemiskinan, akan didukung melalui program:
- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi kegiatan :
 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 Kabupaten / Kota;
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
- c. Pencapaian NSPK dan SPM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahwa mulai tahun 2015 sudah tidak ada dukungan dalam pencapaian NSPK dan SPM untuk bidang Ketenagakerjaan.

Tantang dan Peluang dalam rangka meningkatkan pelayanan perangkat daerah yang diuraikan kedalam bidang pelayanan yang diberikan, selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

➤ Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Tantangan dan peluang pelayanan Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja yaitu:

- a. Jumlah pengangguran di Kabupaten Pati masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.
- b. Mengembangkan media sosial yang mempermudah akses pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dalam memperoleh informasi pasar kerja/lowongan kerja dan pengguna tenaga kerja dalam merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja/Perusahaan tersebut.
- c. Melakukan sosialisasi informasi dan peluang kerja serta penyuluhan bimbingan jabatan/ karir serta memfasilitasi pemetaan bakat dan minat calon pencari kerja
- d. Pengoptimalan Aplikasi Pusat (SIAP KERJA), dan sinergitas dengan lembaga pendidikan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- e. Perlu adanya peningkatan kualitas dari pencari kerja untuk bisa mengisi lowongan-lowongan kerja yang tersedia.

➤ Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tantangan dan peluang pelayanan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- a. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja.
- b. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terampil/ kompetensi sesuai dengan keahlian sektor perusahaan/ industri serta pelatihan kerja yang dilaksanakan belum mengacu pada kebutuhan pasar/ pengguna tenaga kerja.
- c. Produktivitas sangat diharapkan di perusahaan baik produk maupun jasa namun masih rendah dan minimnya penerapan produktivitas dalam dunia kerja.
- d. Gubernur dan bupati/walikota mengkoordinasikan Kerjasama yang dibangun lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas di tingkat Daerah. Dan mengatur pembentukan jejaring lembaga lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas dimaksud.

- e. Melakukan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dengan meningkatkan kompetensi lembaga, Instruktur dan tenaga pelatihan, mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dilatih maupun yang sudah bekerja di perusahaan, dan meningkatkan jumlah Asesor di Balai Latihan Kerja (BLK) guna menjadikan BLK juga berfungsi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) tenaga kerja.
- f. Jumlah perusahaan besar dan menengah memadai untuk mendukung program pemagangan serta perusahaan yang memahami program pemagangan terbatas sehingga yang bersedia mendukung masih rendah.

➤ Bidang Hubungan Industrial

Tantangan dan peluang pelayanan Bidang Hubungan Industrial

- a. Peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh Perusahaan.
- b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan hubungan industrial ke perusahaan serta peningkatan kapasitas perangkat hubungan industrial (Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan kajian isu-isu, kondisi, permasalahan, tantang dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan
- b. Penyerapan tenaga kerja

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat seperti tersebut di atas menjadi tanggungjawab Disnaker Kab. Pati dan yang tertuang di Rancangan Awal RKPD Kab. Pati. Hal ini perlu penanganan segera serta merealisasikan dalam bentuk usulan program dan kegiatan yang dapat memecahkan/mengurangi permasalahan yang ada.

Dengan demikian proses dari Musrenbang Desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten untuk permasalahan-permasalahan yang dituangkan pada program dan kegiatan betul-betul

diaplikasikan di lapangan sehingga tidak ada program dan kegiatan yang muncul dengan tiba-tiba tanpa melalui tahapan Musrenbang.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renja Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9,008,239	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6,339,250
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan	100%	6,101,639	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan	100%	5.885.580
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	34,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	61.888,5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 Dokumen	6,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 Dokumen	38.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	4,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	3.500

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan	17,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan	14.588.5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan	32 Dokumen	4,682,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan	32 Dokumen	4.542.288
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang / bulan	4,600,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang / bulan	4.469.250
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	66.802
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	26 Laporan	7,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	26 Laporan	5.236
	Administrasi Barang Milik Daerah		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	4 Laporan	32,000	Administrasi Barang Milik Daerah		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	4 Laporan	37.200

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	32,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	37.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Jenis Layanan	98,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Jenis Layanan	87.320
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70 Paket	28,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62 Paket	22.320
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	65.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pendukung administrasi umum perangkat daerah	7 Jenis	200,939	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pendukung administrasi umum perangkat daerah	7 Jenis	232,169,1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	6,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	5,394
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.,57,6
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,999
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	2,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	2,248,5

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	3,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	2,996
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	60,439	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	89,9240
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	2,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	2,4500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Paket	46,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Paket	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	31,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Jenis Layanan	861,500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Jenis Layanan	796,780
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	710 Laporan	1,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	710 Laporan	1,050
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	212,400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	620,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati, Pati, Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	583,330

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	an	
	Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Daerah	Milik Daerah Pemerintahan	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Paket	147,000	Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Daerah	Milik Daerah Pemerintahan	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Paket	127,934,4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	38 Unit	82,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	38 Unit	98,054,4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit	25,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit	29,880
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	40,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0 Unit	0
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Rasio realisasi/target yang ditetapkan di RTK	0,94 Angka	40,000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Rasio realisasi/target yang ditetapkan di RTK	0,94 Angka	18,346
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah RTK yang tersusun	1 Dokumen	40,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah RTK yang tersusun	1 Dokumen	18,346
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	20,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	0
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	20,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	18,346
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	40 Persen	391,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	40 Persen	159,720

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Pelatihan Unit Kompetensi	berdasarkan	Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi	40 Orang	270,000	Pelaksanaan Pelatihan Unit Kompetensi	berdasarkan	Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi	40 Orang	52,920
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang	240,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	50,000
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	5,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lemba ga	2,920
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 Unit	25,000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit	0
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi (LPKS)	100 Orang	40,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi (LPKS)	100 Orang	38,800
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	40,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lemba ga	38,800
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	1 Lembaga	10,000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	1 Lemba ga	10,000
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Perizinan	10,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Perizin an	10,000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktivitasnya meningkat	7 Perusahaan	51,000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktivitasnya meningkat	7 Perusahaan	40,000
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	51,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	40,000
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja	3 Persen	20,000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja	3 Persen	18,000
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	20,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	18,000
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang terserap	75 %	324,000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang terserap	75 %	183,724
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	6000 Orang	194,000	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	6000 Orang	99,000
	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1000 Orang	3,000	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1000 Orang	20,000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	6,000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	4,000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	185,000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	75,000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan lewat LPTKS	100 Orang	11,000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan lewat LPTKS	100 Orang	19,000
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	18 Lembaga	11,000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	10 Lembaga	19,000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah lowongan kerja yang bisa diakses oleh pencari	6000 Orang	59,000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah lowongan kerja yang bisa diakses oleh pencari	6000 Orang	47,500
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	4,000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	7,000
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	3600 Orang	55,000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	3700 Orang	40,500
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah PMI yang Ditempatkan dari PPPMI	100 Orang	60,000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah PMI yang ditempatkan dari PPPMI	110 Orang	18,224
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	4 Orang	25,000	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	0
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Pati, Semua Kecamatan,	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA	100 Orang	3,000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Pati, Semua Kecamatan,	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA	110 Orang	3,000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Semua Kelurahan	dan PMI Bermasalah yang Ditangani				Semua Kelurahan	dan PMI Bermasalah yang Ditangani		
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	32,000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	15,224
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja	1 Angka	2,151,800	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja	1 Angka	91,880
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	60 Persen	2,068,800	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	60 Persen	32,065
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Pati, Pati Kidul	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	2,068,800	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Pati, Pati Kidul Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	32,065
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perselisihan yang terjadi	9 Perkara	83,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perselisihan yang terjadi	9 Perkara	59,815

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Kidul	Pati, Pati	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	9 Perkara	51,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Kidul	Pati, Pati	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	9 Perkara	20,915
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Kidul	Pati, Pati	Jumlah Perselisihan yang Terselesaikan	9 Perkara	10,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Kidul	Pati, Pati	Jumlah Perselisihan yang Terselesaikan	9 Perkara	8,900
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Kidul	Pati, Pati	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	22,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Kidul	Pati, Pati	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	30,000
	JUMLAH TOTAL					9,008,239	JUMLAH TOTAL					6,339,250

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Tahun 2024

Rincian ketidaksesuaian anggaran di Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah :
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
 - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) :
 - a) Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.
3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi :
 - a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - b) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja:
 - 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta :
 - a) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
 - 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja :
 - a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.
 - 4) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil :
 - a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
 - 5) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - 1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Pelayanan Antar Kerja;
 - b) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
 - c) Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Satu (1) Daerah Kab./Kota :
 - a) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.
 - 3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja :
 - a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - b) Job Fair/Bursa Kerja.

- 4) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota :
 - a) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
 - b) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
 - 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota :
 - a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Ketidaksesuaian tersebut karena adanya pergeseran penghitungan anggaran di Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat dimulai dari Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang dikelompokkan pada tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD). Dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat program dan kegiatan tersebut dikonfirmasi dan mendapat tanggapan dari Perangkat Daerah. Dari verifikasi program dan kegiatan di Forum Perangkat Daerah perwakilan masyarakat bertemu dengan Perangkat Daerah untuk mendapatkan penjelasan dari Perangkat Daerah dan dikawal sampai dengan Musrenbang Kabupaten. Hasil Musrenbang Kabupaten ditampung di RKPD Kab. Pati dan program kegiatan yang akan dilaksanakan PD serta mendapat dukungan APBD Kab. Pati.

Proses penyusunan RKPD, Perangkat Daerah membuat Renja dengan berpedoman pada program dan kegiatan hasil Musrenbang yang

tertuang pada RKPD termasuk tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Disnaker Kab. Pati berkomitmen bahwa program dan kegiatan yang tidak ada di Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kab. Pati tidak dapat diusulkan pada APBD Kab.Pati.

Oleh karena itu program dan kegiatan yang diusulkan serta berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah menjadi skala prioritas sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran sehingga capaian kinerja menjadi lebih baik dengan menyesuaikan ketersediaan plafon anggaran. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kab. Pati

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	40 Persen	
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi	32 Orang	
1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Desa Bakaran Wetan, Kec. Juwana, Desa Tegalarum, Kec. Margoyoso, Desa Ronggo, Kec. Jaken, Desa Pati Kidul, Kec. Pati, Desa Gembong, Kedung bulus, Kec. Gembong	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96 Orang	Usulan kegiatan dari Desa Ronggo, Kec. Jaken telah diakomodir tahun 2024 (pelatihan mebelair)
2	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktivitasnya meningkat	7 Perusahaan	
2.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Desa Mojo, Kec. Cluwak	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	Pelatihan peningkatan nilai tambah hasil perkebunan (rambutan)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Tahun 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 , maka Empat Pilar Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

- ❖ Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
- ❖ *Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat*
- ❖ Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
- ❖ Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Prioritas Pembangunan Nasional pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. *Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;*
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
4. Penguatan stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang daya saing berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
3. *Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif serta inklus dan merata;*
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Urusan Pembangunan untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2045 Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja meliputi kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja meliputi kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Satu (1) Daerah Kab./Kota, Pengelolaan

Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota.

- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja meliputi kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja meliputi kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Satu (1) Daerah Kab./Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota.
- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- a. Program Hubungan Industrial meliputi kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025

yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. *Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;*
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat;

4. Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik.

Tema pembangunan Kabupaten Pati tahun 2025 ***Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berkelanjutan Untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Daerah***, dengan Fokus pembangunan pada tahun tersebut adalah meningkatkan ketahanan ekonomi, khususnya sektor utama penopang perekonomian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Berdasarkan tema pembangunan diatas maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Penguatan Ekonomi lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Penurunan kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan tata kelola pemerintah melalui penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik.

Strategi Pembangunan Daerah Kab. Pati yang mengacu pada RPD Kabupaten Pati 2023-2026 yang sesuai dengan Tugas Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati adalah Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan Peningkatan kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kab. Pati yang mengacu pada RPD Kabupaten Pati 2023-2026 adalah Penguatan koordinasi dan evaluasi urusan ketenagakerjaan; Penyediaan informasi pasar kerja; Peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok fungsi Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati secara eksplisit masuk di point 3 ***Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing***. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada point 3 ***Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif serta inklus dan merata***; Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati pada point 2 ***Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin***.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023-2026, Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- 1. Terjaganya stabilitas elastisitas kesempatan kerja, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :
 - a. Meningkatnya lapangan kerja formal dan informal
 - b. Meningkatnya kondusivitas hubungan industrial
- 2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
 - a. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pada angkatan kerja

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
1	Terjaganya stabilitas elastisitas kesempatan kerja		Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	Angka	1,15
		Meningkatnya lapangan kerja formal dan informal	Pertumbuhan penempatan tenaga kerja	Persen	50
		Meningkatnya kondusivitas hubungan industrial	Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial	Persen	100
2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,45
		Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pada angkatan kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Juta /orang	47

Untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Tahun 2025 dengan di dukung 5 program, 19 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.339.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota terdiri atas 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 5.885.580.000,00
- Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 4 program, 12 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 453.670.000,00.

Program kegiatan tersebut tersebar secara merata di wilayah Kab. Pati, dengan sasaran kelompok masyarakat miskin, penganggur/setengah penganggur, pencari kerja, desa migrant produktif, pengusaha pemula, pembentukan kelompok usaha kecil atau mandiri, penduduk usia produktif.

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis dalam organisasi perangkat daerah merupakan aspek yang krusial dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, risiko strategis mencakup berbagai potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan menerapkan manajemen risiko yang komprehensif, perangkat daerah dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko tersebut secara proaktif, sehingga memastikan keberlanjutan program dan kebijakan publik yang direncanakan. Pendekatan ini juga memungkinkan perangkat daerah untuk menyesuaikan strategi operasional dengan cepat dan efisien, meminimalkan dampak negatif, serta memaksimalkan peluang untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023-2026, telah dilakukan identifikasi resiko strategis dan ditetapkan resiko strategis sebagai berikut :

1. Adanya penurunan jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Pati;
2. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati;
3. Penurunan partisipasi angkatan kerja;
4. Adanya penurunan jumlah penempatan kerja;
5. Adanya peningkatan jumlah kasus Hubungan Industrial;
6. Penurunan produktifitas Tenaga Kerja.

Selanjutnya dari hasil analisis resiko berdasarkan skala dampak yang ditimbulkan dan skala kemungkinan terjadi ditetapkan 2 (dua) resiko prioritas, sebagai berikut :

1. Adanya penurunan jumlah penempatan kerja;

Pernyataan ini merupakan identifikasi resiko dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya lapangan kerja formal dan informal dengan indikator pertumbuhan penempatan tenaga kerja. Resiko ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara kualifikasi lowongan dan kompensasi pencari kerja, sehingga menimbulkan dampak pencari kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Rencana tindak pengendalian yang akan dilaksanakan adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM petugas pengantar kerja, mengadakan Job

Fair dan Info Loker melalui media sosial dengan target waktu penyelesaian bulan Januari s/d Desember tahun 2025.

2. Adanya perkara Hubungan Industrial.

Pernyataan ini merupakan identifikasi resiko dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kondusivitas hubungan industrial dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial. Resiko ini disebabkan karena terjadinya perselisihan antara pengusaha dan buruh, sehingga menimbulkan dampak mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja. Rencana tindak pengendalian yang akan dilaksanakan adalah dengan melakukan sosialisasi serta optimalisasi fungsi lembaga Tripartit dan Bipartit dengan target waktu penyelesaian bulan Januari s/d Desember tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Saran Strategis	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya lapangan kerja formal dan informal	Pertumbuhan penempatan tenaga kerja	Adanya penurunan jumlah penempatan kerja	5,69	Ketidaksesuaian antara kualifikasi lowongan dan kompetensi pencari kerja	Pencari kerja tidak mendapatkan pekerjaan	Meningkatkan kapasitas SDM petugas pengantar kerja, Mengadakan Job Fair: Info Loker melalui media sosial	Kepala Disnaker	Januari s/d Desember
Meningkatnya kondusivitas hubungan industrial	Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial	Adanya perkara Hubungan Industrial	3,98	Terjadinya perselisihan antara pengusaha dan buruh	Mogok kerja, PHK	Melakukan sosialisasi serta optimalisasi fungsi lembaga Tripartit dan Bipartit	Kepala Disnaker	Januari s/d Desember

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kab. Pati mengacu pada tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja 2023-2026 yang tertuang di dalam Tugas dan Fungsi, RKPD Kab. Pati Tahun 2025 dan Hasil Musrenbang Kab. Pati. Program dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati 2023-2026, pencapaian SDGs, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah sehingga tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pati dapat tercapai serta program Provinsi Jawa Tengah dan program nasional menjadi terwujud tepat sasaran. Program dan kegiatan untuk tahun 2025 secara umum sebagai berikut:

1.1 Non Urusan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah :
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Fasilitas Kunjungan Tamu;
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR/ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) :
 - a) Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi :
 - a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - b) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja:
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta :
 - a) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
- 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja :
 - a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.
- 4) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil :
 - a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
- 5) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- 1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Pelayanan Antar Kerja;
 - b) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
 - c) Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Satu (1) Daerah Kab./Kota :
 - a) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.
- 3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja :
 - a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - b) Job Fair/Bursa Kerja.
- 4) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota :
 - a) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
 - b) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati yang dituangkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 4 program, 12 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 453.670,00, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota terdiri atas 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan anggaran

Rp. 5.885.580.000,00 yang didanai oleh APBD Kab. sebesar Rp. 6.339.250.000,00 sedangkan APBD Provinsi dan APBN dalam tahap mengusulkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dirinci pada Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kab. Pati sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA						6.339.250.000,00							8.986.565.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.339.250.000,00							8.986.565.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.339.250.000,00							8.986.565.000,00	
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan	100 Persen			100 Persen	5.885.580.000,00						100 Persen	6.051.765.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen			6 Dokumen	61.888.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Daerah	6 dokumen	39.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berakarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berakarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Kab. Pati	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	104 Laporan			26 Laporan	5.236.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Kab. Pati	26 Laporan	8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	16 Laporan			4 Laporan	37.200.000,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n dan peme rataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Kab. Pati	4 Laporan	33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan			4 Laporan	37.200.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n dan peme rataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Kab. Pati	4 Laporan	33.000. 000,00	DINAS TENAGA KERJA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket			1 Paket	9.999.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Kab. Pati	1 Paket	13.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	200 Dokumen			50 Dokumen	2.248.500,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Kab. Pati	50 Dokumen	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit			38 Unit	98.054.400,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Kab. Pati	38 Unit	85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	653 Unit			60 Unit	29.880.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Kab. Pati	165 Unit	26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rasio realisasi/target yang ditetapkan di RTK	0.94 Angka			0.94 Angka	18.346.000,00						0.94 Angka	21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah RTK yang tersusun	4 Dokumen			1 Dokumen	18.346.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berakarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemkab dan Masyarakat	1 Dokumen	21.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	15 Orang			5 Orang	18.346.000,00	Kab. Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berakarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemkab dan Masyarakat	5 Orang	21.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	40 Persen			40 Persen	159.720.000,00						40 Persen	451.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi	38 Orang			16 Orang	52.920.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk	Masyarakat dan Pencari Kerja	45 Orang	326.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	208 Orang			16 Orang	50.000.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Jaken, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Juwana, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Margoyoso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Pencari Kerja	64 Orang	320.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga			5 Lembaga	2.920.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Pencari Kerja	5 Lembaga	6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi (LPKS)	400 Orang			100 Orang	38.800.000,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n dan peme rataan Kualitas Sumber Daya Manusia	LPKS	100 Orang	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4 Lembaga			1 Lembaga	38.800.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n dan peme rataan Kualitas Sumber Daya Manusia	LPKS	1 Lembaga	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	4 Lembaga			1 Lembaga	10.000.000,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan,	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n dan peme rataan Kualitas Sumber Daya	LPKS	1 Lembaga	11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Manusia				
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	4 Perizinan			1 Perizinan	10.000.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n dan peme rataan Kualitas Sumber Daya Manusia	LPKS	1 Perizinan	11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktivitasnya meningkat	26 Perusaha an			7 Perusahaa n	40.000.000,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n dan peme rataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perusahaan kecil	8 Perusahaa n	52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40 Perusahaa n			10 Perusahaa n	40.000.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	Perusahaan kecil	10 Perusahaa n	52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	48 Dokumen			12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Pencari Kerja, Pemerintah, Perusahaan	12 Dokumen	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	14300 Orang			3700 Orang	40.500.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penurunan Kemiskinan dengan menekan pada peningkatan keerdayaan masyarakat	Masyarakat dan Pencari Kerja, Pemerintah, Perusahaan	3600 Orang	57.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga			1 Lembaga	30.000.000,00	Kab. Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pekerja, Pengusaha, SP/SB	1 Lembaga	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H							6.339.250.000,00							8.986.565.000,00	

4.2 Manajemen Risiko Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional dalam organisasi perangkat daerah merupakan elemen fundamental yang berperan dalam menjaga kelangsungan operasional dan efisiensi layanan publik. Risiko operasional mencakup berbagai potensi gangguan yang berasal dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau masalah sistemik yang dapat menghambat kinerja organisasi. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko operasional yang menyeluruh, perangkat daerah dapat secara efektif mengidentifikasi dan memitigasi sumber-sumber risiko ini, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025, telah dilakukan identifikasi resiko operasional dan selanjutnya dianalisa berdasarkan skala dampak yang ditimbulkan dan skala kemungkinan terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi keuangan tidak dicatat pada akun dan periode yang tepat;
2. Transaksi mutasi aset tidak tercatat dalam laporan barang atau pencatatannya tidak sesuai ketentuan;
3. Peserta pelatihan tidak lulus uji kompetensi;
4. LPKS tidak tertib laporan kegiatan LPKS;
5. Banyak LPKS yang belum melaksanakan akreditasi;
6. Kelompok usaha yang ada di desa jarang mendapatkan pelatihan;
7. Dokumen pengukuran produktifitas tingkat Kabupaten kurang valid;
8. Rendahnya penempatan tenaga kerja;
9. Informasi lowongan pekerjaan dan data penempatan tenaga kerja kurang valid;
10. Beberapa Perusahaan belum menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan beberapa karyawan belum mendapatkan jaminan sosial;
11. Banyaknya Perselisihan Hubungan Industrial yang akan terjadi.

Selanjutnya hasil analisa terhadap resiko operasional diatas ditetapkan Rencana Tindak Pengendalian dengan target waktu penyelesaian Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel

4.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Pati Tahun 2025

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Transaksi keuangan tidak dicatat pada akun dan periode yang tepat	1,07	Dokumen keuangan tidak lengkap / penyampaian terlambat	Pencatatan transaksi keuangan tidak sesuai standar	Pencatatan transaksi keuangan di catat di aplikasi SIPD di hari yang sama	Sekretaris	Januari s/d Desember
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Transaksi mutasi aset tidak tercatat dalam laporan barang atau pencatatannya tidak sesuai ketentuan	1,08	Penatausahaan aset tidak tertib; Petugas pengurus barang kurang memahami peraturan	Nilai persediaan / aset yang tersaji dalam laporan tidak valid	Monitoring dan evaluasi per triwulan laporan persediaan dan aset	Sekretaris	Januari s/d Desember
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja							
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi	Peserta pelatihan tidak lulus uji kompetensi	2,04	Kurangnya kesadaran peserta pelatihan akan pentingnya sertifikat kompetensi	Tidak terpenuhinya target peserta pelatihan yang kompeten	Memotivasi peserta pelatihan	Kabid Lattas	Januari s/d Desember

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi (LPKS)	LPKS tidak tertib laporan kegiatan LPKS	0,78	Kurangnya koordinasi dengan seksi yang membawahi LPKS	Laporan jadi terkendala	Melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi di LPKS	Kabid Lattas	Januari s/d Desember
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	Banyak LPKS yang belum melaksanakan akreditasi	1,14	Sebagian besar LPKS tidak memahami tentang akreditasi LPKS	Belum ada pengakuan kompetensi dari Komite Akreditasi	Melaksanakan Bimtek Akreditasi LPKS	Kabid Lattas	Januari s/d Desember
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya	Kelompok usaha yang ada di desa jarang mendapatkan pelatihan	1,04	Sebagian besar kelompok usaha, produknya belum mempunyai ijin usaha	Timbul persaingan antar pengusaha yang tidak sehat	Memberikan pelatihan peningkatan produktivitas kepada kelompok usaha yang ada di desa agar dapat meningkatkan produk yang dihasilkan	Kabid Lattas	Januari s/d Desember
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan produktivitas	Dokumen pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten kurang valid	2,25	Tidak memiliki tenaga ahli di Kabupaten Pati dan instrumen pengukuran yang kompleks	Tidak dapat mengetahui Tingkat produktivitas dari tenaga kerja di Kabupaten Pati	Meningkatkan kemampuan SDM Disnaker dengan mengikuti pelatihan penyusunan dokumen produktivitas	Kabid Lattas	Januari s/d Desember

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terserap							
Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kerja yang ditempatkan	Rendahnya penempatan tenaga kerja	3,41	Ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan lowongan yang tersedia, Kurangnya mentalitas pekerja bagi generasi jaman sekarang	Pencari kerja tidak mendapatkan pekerjaan	Mengadakan job Fair, Info Loker melalui media sosial, Penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Kabid PPTK	Januari s/d Desember
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang bisa diakses oleh pencari	Informasi lowongan pekerjaan dan data penempatan tenaga kerja kurang valid	3,69	Perusahaan tidak menginformasikan lowongan kerja dan tidak melaporkan penempatan tenaga kerja di perusahaannya	Tidak ada data lowongan pekerjaan yang dapat diakses para pencari kerja	Melakukan job canvassing ke perusahaan, Membuat jejaring manajer SDM perusahaan se Kabupaten untuk mempermudah distribusi info lowongan kerja	Kabid PPTK	Januari s/d Desember
Program Hubungan Industrial	Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja							
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Beberapa Perusahaan belum menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan beberapa karyawan belum mendapatkan jaminan sosial	2,36	Perusahaan baru sehingga belum tahu aturan ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial tidak maksimal	Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pengusaha dan pekerja	Kabid HI	Januari s/d Desember

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang terjadi	Banyaknya Perselisihan Hubungan Industrial yang akan terjadi	2,14	Para pihak belum memahami aturan ketenagakerjaan	Kondisi ketenagakerjaan tidak kondusif	Melakukan pembinaan dan pendekatan yang baik dengan para pihak	Kabid HI	Januari s/d Desember

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2025.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja ini, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi pada setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :
 1. Mekanisme perencanaan yang detail, efisien dan selektif;
 2. Tepat sasaran; dan
 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.
- ❖ Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :
 1. Penentuan target kegiatan yang tinggi dan terlalu rendah berakibat pada realisasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
 2. Kompetensi tenaga kerja yang masih rendah.
 3. Penempatan tenaga kerja masih rendah.
- ❖ Sedangkan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :
 1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya.
 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
 3. Optimalisasi fungsi perencanaan dan koordinasi.
 4. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja.
 5. Optimalisasi pelaksanaan program 3 in 1 (pelatihan, magang, penempatan).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2025.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja ini, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi pada setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan Renja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. Diharapkan semua sumber daya Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I

NID 10670011 198607 1 001